

Judul : Pembiayaan kegiatan. Kemenko Perekonomian minta tambahan anggaran
Tanggal : Kamis, 15 September 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 17

:: PEMBIAYAAN KEGIATAN

Kemenko Perekonomian Minta Tambahan Anggaran

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta penambahan pagu anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp210,5 miliar, sehingga total pagu menjadi Rp560,9 miliar. Sebelumnya pagu awal yang diperoleh hanya Rp350,4 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, usulan penambahan anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan kementerian yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Padahal, tahun ini pihaknya mendapat Rp359,2 miliar sudah termasuk pemangkas anggaran.

"Di dalamnya juga ada anggaran untuk KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional) Rp44,3 miliar. Jadi kalau dikurangi, sebetulnya anggarannya Rp305,3 miliar," kata Darmin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dari pagu tersebut, Darmin merinci, pihaknya membagi-

nyake dalam beberapa unit eselon I kedeputian. Kedeputian percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah mendapatkan porsi anggaran terbesar Rp80,2 miliar, diikuti kedeputian perniagaan dan industri Rp16,7 miliar, kedeputian pengelolaan energi sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup Rp16,2 miliar, kedeputian pangan dan pertanian Rp15,1 miliar, kedeputian makro dan keuangan Rp12,3 miliar, dan kedeputian ekonomi kreatif Rp12 miliar.

"Untuk tahun ini, dari Rp359,2 miliar, penyerapannya sampai saat ini sudah 44,3%. Ini lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu 28,6%," imbuhnya.

Darmin menambahkan, usulan penambahan anggaran tersebut juga sudah termasuk rencana kenaikan tunjangan pegawai Kemenko Perekonomian

sebesar Rp10 miliar. Hal ini untuk menaikkan porsi tunjangan dari 59% menjadi 70% terhadap total gaji dan tunjangan pegawai.

"Sebenarnya ini juga tidak terlalu besar karena jumlah pegawainya tidak terlalu banyak," sambungnya.

Adapun, kegiatan yang

akan dilakukan Kemenko Perekonomian masih berkisar pada percepatan implementasi paket kebijakan ekonomi melalui satuan tugas (satgas), kebijakan satu peta (*one map policy*), dan koordinasi kebijakan pangan, air, dan energi, keuangan inklusif khususnya kredit usaha rakyat (KUR), serta pengem-

bang kawasan ekonomi khusus (KEK).

Anggota Badan Anggaran DPR Andi Rahmat berharap, Kemenko Perekonomian bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama terkait masalah pangan.

Menurut dia, fungsi Kemenko Perekonomian sebagai koordinator harus terlihat dari bagaimana menyinergikan antara dua kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang selama ini memiliki data yang berbeda.

"Masalah impor pangan ini tampaknya juga masih menjadi solusi yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan bahan pangan. Saya berharap sampai impor ini dilakukan secara keberlanjutan," pungkasnya.

● rahmat
fiansyah



DARMIN NASUTION